

***Collaborative Governance* melalui Deliberasi Publik untuk Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Berbasis SDGs: Pendekatan FGD di Desa Sungai Langka**

Dian Kagungan¹, Rahayu Sulistyowati², Suropto³, Ani Agus Puspawati⁴, Diang Aditya⁵, Yulianto⁶, Arief Sugiono⁷, Jeni Wulandari⁸, Intan Fitri Meutia⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Lampung

*Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

*Korespondensi: dian.kagungan@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengidentifikasi peran dan kewenangan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan desa wisata melalui pendekatan collaborative governance serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, akuntabel, dan mampu memperkuat kelembagaan desa. Kegiatan dilaksanakan di Desa Sungai Langka dengan menggunakan metode sosialisasi, sharing session, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi lapangan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya deliberasi publik dalam proses perencanaan dan pengelolaan pariwisata desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, partisipasi masyarakat, serta sinergi antarpemangku kepentingan. Penyampaian materi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, pemerintah Desa Sungai Langka, dan pengelola destinasi wisata setempat memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Kegiatan ini menghasilkan kesepahaman mengenai pembagian peran dan tanggung jawab antaraktor serta mendorong terbentuknya komitmen bersama dalam pengembangan desa wisata. Sebagai luaran, hasil pengabdian didiseminasikan melalui publikasi pada jurnal nasional pengabdian kepada masyarakat guna memperluas penyebaran praktik baik dan kontribusi akademik dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan.

Kata kunci: *Collaborative Governance, Deliberasi Publik, Desa Wisata.*

1. ANALISIS SITUASI

Pembangunan pariwisata berkelanjutan saat ini menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif.

Pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga berperan dalam pelestarian lingkungan, penguatan identitas budaya lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata perlu dilakukan secara terencana dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Noviyanti dkk., 2023).

Salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang banyak didorong di Indonesia adalah desa wisata. Desa wisata dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal yang mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat desa. Selain menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja, desa wisata juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam pengelolaan destinasi wisata. Dengan demikian, desa wisata memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam penguatan ekonomi masyarakat dan pembangunan komunitas yang berkelanjutan (Siok, 2025).

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan desa wisata masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh daya tarik destinasi atau potensi alam yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang diterapkan. Permasalahan yang sering muncul meliputi lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta belum terintegrasinya prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan dan program pengembangan wisata desa (Palupi dkk., 2024). Di sisi lain, perkembangan sektor pariwisata yang berkembang pesat sering kali menimbulkan persoalan baru, seperti konflik kepentingan antaraktor, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya koordinasi kebijakan di tingkat lokal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pembangunan wisata berjalan secara parsial dan kurang mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan tata kelola yang mampu memperkuat koordinasi dan sinergi antaraktor dalam proses pengembangan desa wisata (Noviyanti dkk., 2023).

Pendekatan collaborative governance menjadi salah satu konsep yang relevan untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Collaborative governance menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, kelompok masyarakat sipil, dan akademisi dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan publik. Melalui pendekatan ini, setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan (Siok, 2025).

Desa Sungai Langka di Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa wisata berkelanjutan. Desa ini dikenal sebagai kawasan agrowisata unggulan dengan berbagai potensi lokal, seperti perkebunan kakao, kopi, peternakan kambing Etawa, kerajinan Wastra Sulam Jelujur, serta beragam produk UMKM berbasis masyarakat. Potensi tersebut memberikan peluang besar bagi pengembangan wisata edukasi, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun demikian, pertumbuhan sektor wisata di Desa Sungai Langka belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang memadai. Hubungan antara pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku usaha, kelompok masyarakat, serta pemerintah daerah masih memerlukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur. Kondisi ini menunjukkan adanya *governance gap* yang berpotensi menghambat terwujudnya pengelolaan desa wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan apabila tidak diimbangi dengan penguatan institusi dan partisipasi para pemangku kepentingan (Palupi dkk., 2024).

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan ruang deliberasi publik yang mampu mempertemukan berbagai aktor dalam forum yang partisipatif dan kolaboratif. Deliberasi publik melalui Focus Group Discussion (FGD) dapat menjadi sarana untuk memetakan persoalan, mengidentifikasi kepentingan para pihak, membangun kesepahaman bersama, serta merumuskan arah kebijakan yang lebih inklusif. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran deliberasi publik dalam memperkuat *collaborative governance* guna mendukung pengembangan desa wisata berkelanjutan di Desa Sungai Langka, Kabupaten Pesawaran, sekaligus mengidentifikasi peran para pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang selaras dengan prinsip-prinsip SDGs (Ningtyas dkk., 2025).

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan solusi terkait pengembangan desa wisata berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan prinsip *collaborative governance* yang menekankan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan partisipatif (Noviyanti dkk., 2023). Kegiatan dilaksanakan pada 8

Mei 2026 di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan melibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Desa Sungai Langka, Pokdarwis, Kelompok Wanita Tani (KWT), pelaku UMKM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengelola destinasi wisata, serta akademisi dari Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Lampung. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan membangun forum dialog yang inklusif guna mendukung tata kelola desa wisata yang kolaboratif (Ningtyas dkk., 2025).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu sosialisasi kebijakan publik, berbagi pengalaman (*sharing experience*), *Focus Group Discussion* (FGD), dan observasi lapangan. Sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan dan tantangan pembangunan pariwisata, sedangkan kegiatan berbagi pengalaman memberikan contoh praktik baik dalam pengelolaan destinasi wisata dan pengembangan produk lokal berbasis komunitas (Palupi dkk., 2024). Selanjutnya, FGD digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan, memetakan potensi desa, serta merumuskan rekomendasi kebijakan secara partisipatif. Sementara itu, observasi lapangan dilakukan untuk memverifikasi temuan yang diperoleh selama proses diskusi.

Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan FGD. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis tersebut bertujuan menghasilkan rekomendasi penguatan *collaborative governance*, kelembagaan desa, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa wisata berkelanjutan (Noviyanti dkk., 2023; Siok, 2025).

3. PELAKSANAAN DAN HASIL

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

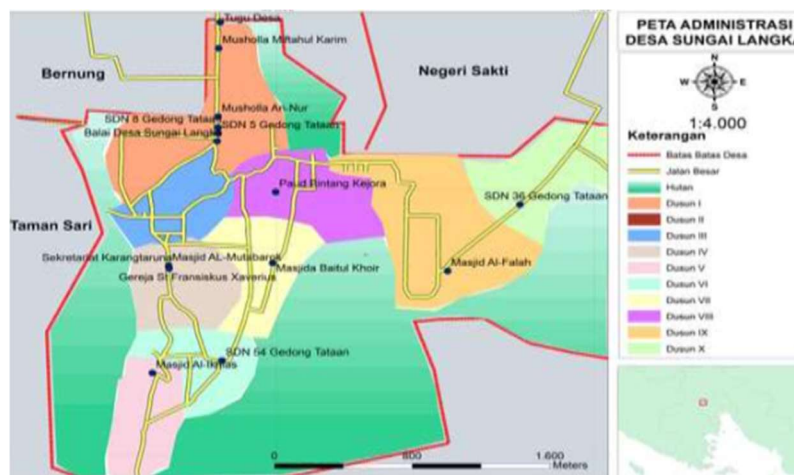
Desa Sungai Langka merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Desa ini berada di kawasan kaki Gunung Sukma Ilang dengan kondisi topografi berupa perbukitan pada ketinggian sekitar 400–500 meter di atas permukaan laut. Kondisi iklim yang sejuk serta dominasi lahan pertanian dan perkebunan menjadikan desa ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai kawasan agrowisata.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menetapkan Desa Sungai Langka sebagai salah satu kawasan pengembangan agropolitan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan agroindustri. Desa ini diarahkan

menjadi pusat atraksi wisata, budidaya kakao, pengembangan UMKM, serta pusat kuliner dan oleh-oleh khas daerah. Keberadaan sektor agroindustri berbasis masyarakat turut mendukung peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perekonomian lokal. Berdasarkan data profil desa, Desa Sungai Langka memiliki jumlah penduduk sekitar 5.036 jiwa yang tersebar di 10 dusun. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian dan perkebunan dengan komoditas unggulan berupa kakao, kopi, dan tanaman palawija. Selain itu, masyarakat juga mengembangkan sektor peternakan, khususnya kambing Peranakan Etawa (PE), serta berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Potensi unggulan Desa Sungai Langka meliputi agrowisata kakao, peternakan kambing PE, kerajinan Wastra Sulam Jelujur, serta produk olahan berbasis kakao, kopi, dan pangan lokal. Kerajinan Sulam Jelujur yang dikelola masyarakat telah dikenal hingga tingkat nasional dan internasional, sementara berbagai produk UMKM seperti coklat olahan, kopi, keripik, dan minuman herbal menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi kreatif desa.

Selain didukung oleh potensi sumber daya alam, pengembangan desa wisata di Sungai Langka juga diperkuat oleh keberadaan kelembagaan masyarakat, seperti Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Tani (Poktan), dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kelembagaan tersebut berperan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan produk lokal, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan.



Gambar 1. Peta Desa Sungai Langka

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Langka, 2020

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan proses perencanaan dan koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana, Dr. Dian Kagungan, M.H. Pada tahap ini, tim melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait guna memastikan

kelancaran pelaksanaan program. Koordinasi melibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Desa Sungai Langka, pengelola destinasi wisata, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta Kelompok Wanita Tani (KWT). Keterlibatan berbagai aktor tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan desa wisata berbasis prinsip keberlanjutan.



Gambar 2. Pemaparan Narasumber
Sumber: Dok. Pengabdian, 2026

Sharing Pengalaman Pengelola Kerajinan Wastra Sulam Jelujur

Gambaran pengalaman nyata dari pengelola salah satu destinasi wisata unggulan Desa Sungai Langka.

- a) **Pusat Kerajinan Sulam Jelujur.** Wastra Sulam Jelujur merupakan salah satu produk kain unggulan yang **berasal** dari Desa Sungai Langka dan telah dikenal hingga tingkat internasional. Desa Wisata Sungai Langka menjadi sentra Sulam Jelujur yang dapat memberikan edukasi kepada wisatawan terkait proses pembuatan kerajinan Sulam Jelujur dan kain tenun yang dibuat secara tradisional. Pengelola menjelaskan bagaimana mereka memastikan tempat pembuatan Sulam Jelujur tetap tersedia dan tertata dengan baik sehingga menarik minat wisatawan untuk berkunjung serta membeli produk hasil kerajinan tersebut.
- b) **Strategi Menjaga Kualitas Hasil Karya Sulam Jelujur.** Melalui binaan dinas terkait, produksi Sulam Jelujur Desa Sungai Langka telah memasuki pasar **nasional** bahkan **internasional**. Selain Wastra Sulam Jelujur, Desa

Sungai Langka juga dikenal sebagai desa **kakao** di Kabupaten Pesawaran. Kakao menjadi salah satu komoditas unggulan desa yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana wisata edukasi. Wisatawan dapat belajar mengenai proses budidaya dan perawatan tanaman kakao. Desa Sungai Langka juga dikenal sebagai sentra kerajinan keripik buah. **Keripik buah** menjadi salah satu produk unggulan UMKM di desa tersebut. Keripik pisang dan nangka merupakan produk yang telah dipasarkan secara luas. **Wisatawan** dapat diajak untuk melihat secara langsung proses pembuatan **keripik** buah.

- c) **Melibatkan Masyarakat dalam Aktivitas Wisata.** Pengelola menjelaskan berbagai cara untuk melibatkan masyarakat sekaligus mempromosikan destinasi wisata melalui media sosial komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi wisata perlu berbasis komunitas.

Focus Group Discussion (FGD)

Hubungan antara pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku usaha, serta pemerintah daerah menunjukkan perlunya mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur. Tanpa arah kebijakan yang jelas dan forum dialog yang inklusif, pengembangan wisata berisiko berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan tata kelola (*governance gap*), yaitu ketika laju pembangunan wisata tidak selalu sejalan dengan penguatan kapasitas institusi dan legitimasi kebijakan di tingkat desa.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, diperlukan ruang deliberatif yang mampu mempertemukan para aktor dalam satu forum partisipatif untuk memetakan persoalan, mengidentifikasi kepentingan, serta merumuskan arah kebijakan bersama. Kegiatan ini dilaksanakan pada 8 Mei 2026 di Balai Desa Sungai Langka. Para aktor yang terlibat antara lain Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, akademisi (tim pengabdian dari FISIP Universitas Lampung), serta unsur kelembagaan Desa Sungai Langka, termasuk Pokdarwis, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan tokoh masyarakat.

Focus Group Discussion (FGD) dipandang sebagai instrumen yang relevan dalam konteks administrasi publik karena memungkinkan terjadinya dialog kolaboratif, pertukaran perspektif, dan pembentukan komitmen kolektif. Melalui pendekatan deliberatif, kegiatan ini tidak hanya bertujuan menggali permasalahan, tetapi juga

menyusun rekomendasi penguatan tata kelola desa wisata yang berbasis prinsip partisipasi dan keberlanjutan.

- a) **Tantangan Pengembangan Destinasi Wisata.** Diskusi antara narasumber dan peserta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti kurangnya pendampingan pemerintah secara berkelanjutan, minimnya promosi digital, serta terbatasnya sumber daya manusia yang memahami pengelolaan destinasi wisata. FGD membantu para peserta memahami permasalahan dari berbagai perspektif, baik dari sisi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Desa Sungai Langka, maupun akademisi. Antusiasme peserta dalam mengikuti sesi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemauan yang kuat untuk belajar dan meningkatkan kapasitasnya. Melalui diskusi kelompok, terbangun kesadaran bahwa masyarakat memiliki potensi besar untuk melakukan transformasi pengelolaan destinasi wisata secara mandiri.
- b) **Peluang dan Potensi Unggulan.** Peserta kemudian mengidentifikasi berbagai potensi yang dimiliki Desa Sungai Langka, seperti wisata edukasi berbasis agrowisata dan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pembahasan mengenai potensi tersebut membantu para peserta menentukan arah dan fokus pengembangan desa wisata pada masa mendatang.

4. PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sungai Langka memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pengetahuan, kapasitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Melalui berbagai rangkaian kegiatan, seperti sosialisasi, berbagi pengalaman (*sharing session*), diskusi kelompok terarah, dan observasi lapangan, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran deliberasi publik sebagai sarana untuk membangun komunikasi, menyelaraskan kepentingan, serta memperkuat kerja sama antarpemangku kepentingan dalam pengembangan desa wisata. Masyarakat semakin memahami bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi wisata tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi antara pemerintah, pengelola wisata, masyarakat, dan berbagai aktor terkait.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ningtyas, D.W., Mutmainah, M., Mudawamah, M., Maulia, F.N. (2025). Implementasi Demokrasi Deliberatif Dalam Formulasi Kebijakan Bantuan Dana Kesehatan Desa Trayu. *Jurnal Administrasi Publik Untirta*. 16(1). <http://dx.doi.org/10.62870/jap.v16i1.33350>
- Noviyanti., Wibisono, H. K., Gamaputra, G., Utami, D. A., & Amelia, E. T. (2023). Collaborative governance in tourism development to achieve village SDGs. In *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2023 (IJCAH 2023)* (pp. 391–403). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-152-4_37
- Nugroho, R., & Setijaningrum, E. (2023). Indonesia's New Capital: An Analysis Of Transparency, Public Participation, And Deliberative Democracy. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*.
- Palupi, S., Bahri, A. S., Ayuningsih, S. F., Abdillah, F., & Rahmat, T. A. (2024). Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Desa Wisata Berbasis Masyarakat dan Berkelanjutan. *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 98–113. <https://doi.org/10.35309/dharma.v5i1.322>
- Siok, M.H.U. (2025). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Loha untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Repository IPDN.